

**PEMANFAATAN TINGGALAN KOLONIAL DI PULAU NEIRA,
KEPULAUAN BANDA, KABUPATEN MALUKU TENGAH
SEBAGAI UPAYA PRESERVASI CAGAR BUDAYA**
*Utilization from Colonial Remains in Neira, Banda Island,
Central Maluku Regency as Heritage Preservation*

Karyamantha Surbakti

Balai Arkeologi Provinsi Maluku
Jl. Namalatu-Latuhalat, Nusaniwe, Kodya Ambon 97118
Email: karyamantha.surbakti@kemdikbud.go.id

Naskah diterima: 30-09-2019; direvisi: 16-07-2020; diterima: 26-02-2021

Abstract

This article written to explain about heritage preservation in Banda, especially how to made some management and utilization of cultural heritage in Banda Island. Banda actually is an important locality related to past civilization, where in this area there are many traces of colonial buildings that must be preserved in order to treat the historiographical pieces that exist in one of Indonesia regions. In the past, Neira Island was the center of trade and cultural activities for the various ethnic groups. This research aims to look at the various archaeological remains in Banda Neira and what kind of management form that use have been carried out by various stakeholders there. Are they use management and utilization based on significance value and conservation perspective. The methods applied in this research are surveys and interviews. The result showed that Neira which has aquite number of archaeological remains in the form of colonial buildings, has now changed its use to government offices, mini museums, and etc. The management of cultural heritage in Neira shows a situation where the function and use of colonial buildings has not been managed optimally. In other words, management that ignores significance value and not to tendention for conservation and preserved authentic value of archaeological remains, will ruined as cultural heritage meaning. Keywords: significant value, preservation, heritage, culture resource management.

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk melihat bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan warisan budaya yang ada di Pulau Banda. Pulau Banda sendiri menjadi lokalitas penting berkaitan dengan peradaban silam, dimana di wilayah ini banyak terdapat jejak tinggalan bangunan kolonial yang harus dipreservasi guna merawat kepingan historiografi yang ada di salah satu wilayah Indonesia. Pulau Neira di masa lalu menjadi pusat aktivitas perdagangan dan kultural dari berbagai suku bangsa yang pernah singgah di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan melihat pelbagai tinggalan arkeologis di Banda Neira dan menilik bentuk pemanfaatan dan pengelolaan yang sudah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di sana. Apakah pengelolaan dan pemanfaatan jejak tinggalan arkeologis disana sudah berbasis nilai penting dan berwawasan pelestarian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Neira yang memiliki cukup banyak tinggalan arkeologis berupa bangunan kolonial, kini penggunaannya telah beralih fungsi menjadi kantor pemerintahan, museum mini, dan sebagainya. Pengelolaan warisan budaya di Neira menunjukkan situasi dimana alih fungsi pemanfaatan bangunan kolonial, belum dikelola secara maksimal. Dengan kata lain pengelolaan yang tidak mengindahkan manajemen berbasis nilai penting dan bertendensi pelestarian akan mengakibatkan tergerusnya nilai otentik dari tinggalan-tinggalan arkeologis tersebut sebagai cikal bakal cagar budaya. Kata kunci: nilai penting, pelestarian, warisan budaya, manajemen sumberdaya budaya.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya arkeologis di Pulau Neira, di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Tinggalan budaya materi periode kolonial di pulau ini masih bertahan dan bersinggungan dengan komunitas masyarakat hingga saat ini. Struktur kota kolonial dengan bangunan pendukung bergaya Indis yang sangat mencolok di beberapa area menunjukkan sebuah aktivitas kehidupan yang kompleks di masa lalu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarjiyanto (2009) terungkap bahwa Kota Banda Neira merupakan situs yang memainkan peran penting di masa lalu. Banda Neira mulai bersentuhan dengan pengaruh bangsa asing sekitar akhir abad ke-16 dan abad ke 18-19 Masehi. Intensitas hunian dan pengolahan produksi tanaman pala menghasilkan sebuah tatanan kota yang sangat kompleks dan padat (Sarjiyanto 2009, 4). Kepulauan Banda, terutama Pulau Banda Neira adalah bagian dari *The Spice Islands* atau kepulauan rempah-rempah yang meliputi Kepulauan Maluku secara keseluruhan. Sejak dulu Banda Neira telah dikenal sebagai penghasil utama tanaman buah pala. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan rempah-rempah menyebabkan orang Eropa kemudian berlomba-lomba mendatangi wilayah ini. Rekam jejak bangsa Eropa dalam usahanya menguasai perdagangan pala di masa lalu masih terbentang di Banda Neira hingga saat ini. Rekaman ini masih tersimpan dalam bentuk tinggalan fisik berupa bangunan-bangunan berarsitektur kolonial. Daya tarik inilah yang kemudian menjadikan Banda Neira sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Namun sayangnya rekaman-rekaman ini tidak dapat diputar ulang, dalam artian tinggalan ini belum mampu dioptimalkan sebagai sebuah informasi sejarah di masa lalu. Daya tarik Banda Neira masih sebatas pada bangunan-bangunan kolonialnya. Mereka yang berkunjung ke Banda Neira belum memperoleh

penggalan cerita yang ada di balik bangunan-bangunan tersebut (Mansyur 2009, 80).

Lebih lanjut Mansyur (2009) memaparkan, seharusnya museum yang ada di Banda Neira mampu menjembatani publik menuju masa lalu dan mampu berperan sebagai gudang data. Benda budaya yang ada di dalamnya tentu saja merupakan kumpulan memori kolektif dari masa lalu. Museum pada titik ini juga diharapkan mampu melestarikan warisan budaya yang dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan pariwisata. Museum juga diharapkan bisa menjadi sebuah lembaga ataupun tempat memelihara identitas, suasana dan narasi kesejarahan masa lalu, agar publik dapat menangkap nilai-nilai apa saja yang diwariskan pada tinggalan kolonial tersebut. Beberapa bangunan kolonial dan koleksi artefak yang dapat diamati saat ini dalam keadaan cukup terawat, meskipun di beberapa bagian membutuhkan penanganan yang lebih serius dari berbagai pemangku kepentingan untuk pelestarian cagar budaya di Banda Neira (Mansyur 2009, 79).

Penelitian berbasis nilai penting dinilai mendesak sebagai acuan pokok dalam mengkonstruksi dan menelaah peradaban masa lalu. Tiap generasi bisa berargumentasi berkenaan dengan warisan budaya yang mereka punyai dengan beragam interpretasi tentunya. Tinggalan arkeologis yang berdimensi masa lalu dan masyarakat yang kini hidup bersisian dengan tinggalan purbakala tersebut, kini berkomunikasi melalui preservasi dan penyelamatan tinggalan kuno yang ada di wilayah tersebut. Sikap untuk mau berupaya menyelamatkan banyak tinggalan purbakala adalah salah satu bentuk konsep dialogis peradaban (Harrison 2008, 227). Tentu jika dikaitkan dengan preservasi tinggalan arkeologis di Banda Neira, maka sikap dan persepsi yang diperlihatkan banyak *stakeholder* di wilayah ini akan menunjukkan wajah peradaban sesungguhnya generasi Banda Neira hari ini.

Warisan budaya selalu memiliki konteks langsung yang bisaditinjau dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Melihat Pasal 1 dari Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 terdapat beberapa cakupan nilai penting sebuah cagar budaya yaitu dari sisi; (1) nilai penting kesejarahan, (2) nilai penting ilmu pengetahuan, (3) nilai penting pendidikan dan (4) nilai penting kebudayaan. Nilai-nilai penting tersebut dapat mewakili sebuah potensi cagar budaya, sering dikenal dengan istilah nilai hakiki. Biasanya narasi kekunoan dikemas dalam bentuk penekanan nilai hakiki seperti yang dimaksud di atas. Pemaknaan semacam ini berperan untuk menjaga narasi masa lalu dari suatu tinggalan arkeologis, bisa dimengerti oleh generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Untuk menopang sebuah keadaan berkelanjutan suatu warisan budaya, dikenal gagasan untuk mengintegrasikan nilai kultural dan nilai ekonomis. Pemahaman tersebut dikenal luas dalam studi warisan budaya, dan biasanya dua posisi tersebut direkonsiliasi (Throsby 2002, 101). Dalam pandangan Throsby (2002), ada sebuah pengeluaran yang tidak bisa tidak/harus diperlukan agar nilai kultural dari warisan budaya itu bertahan dan nilai ekonominya bisa dikembangkan. Hal konservasi seperti yang dimaksud di atas, hanya bisa dilakukan oleh kebijakan pemerintah yang memang memiliki ukuran kebijakan tertentu dan agenda kebijakan tertentu pula (Throsby 2002, 102).

Menurut (Howard 2003, 41) ada tiga tahapan dalam menelusuri pemahaman nilai penting dari berbagai pihak yang bersinggungan dengan cagar budaya. Pertama adalah adanya motivasi, sebagai hasrat baik manusia secara individu, kelompok masyarakat maupun lembaga pemerintah untuk memiliki tinggalan cagar budaya tersebut. Kedua adalah legitimasi yang umum dilakukan oleh pemerintah untuk mengklaim atas warisan budaya tersebut. Howard memberikan ilustrasi bagaimana di Rusia sekitar tahun 1930-an, pemerintah tidak menghancurkan katedral bergaya gotik di daerah Kremlin, bahkan mengubahnya menjadi

museum yang dapat diakses dengan mudah sebagai tempat edukasi. Pemikiran pemerintah Rusia tersebut dianggap terpengaruh oleh aliran pemikiran sosiolog Jerman bernama Jurgen Habermas yang menganggap tindakan legitimasi pemerintah diperlukan untuk kewenangan dan kontrol. Ketiga adalah institusi atau pranata/aturan yang dilembagakan, sebagai contoh produk hukum dan perundang-undangan serta diberlakukan supaya cagar budaya tersebut dapat dilindungi (Howard 2003, 42).

Apabila mengacu pada pendapat Throsby dan Howard, maka pemerintah memegang peranan penting dalam melegitimasi cagar budaya yang ada di Banda Neira. Pemerintah memiliki kewenangan penuh dan mutlak dalam menjaga budaya materi dari masa kolonial agar tetap lestari. Dengan adanya sebuah institusi yang terbentuk dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Maluku, maka akan diberlakukan suatu aturan yang dapat mengatur pengunjung, himbuan ataupun larangan yang tentu saja untuk kepentingan kelestarian cagar budaya. Segala perilaku dan gagasan manusia terhadap tinggalan arkeologis yang terdapat di Banda Neira menjadi titik pangkal permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan yang akan dibahas dalam artikel ini. Pemanfaatan bentuk fisik bangunan warisan budaya tertentu yang fungsinya kini berlainan dengan fungsi bangunan tersebut di masa lalu, bisa menjadi salah satu upaya alternatif untuk memperpanjang sisi otentisitas benda/bangunan arkeologis itu sendiri dan juga memperluas pemaknaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan warisan budaya di Banda Neira dan apakah pengelolaan yang sudah dilakukan tersebut telah menerapkan kaidah pelestarian terutama kajian yang berbasis nilai penting. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi model pengelolaan tinggalan arkeologi di Banda Neira. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui apakah pengelolaan tersebut menerapkan kaidah

pelestarian yang berbasis nilai penting objek tinggalan budaya karena pengelolaan sumber daya arkeologi sesungguhnya merupakan upaya konservasi yang maksimal terhadap warisan budaya itu sendiri. Nilai penting atau signifikansi dalam terminologi cagar budaya merupakan aspek penting yang perlu selalu dikaji agar ada pembaharuan perspektif dalam melihat cagar budaya yang memang bisa bebas diinterpretasikan arah pengelolaannya. Baik itu dikelola pemerintah, perorangan, swasta, atau dikelola oleh kelompok-kelompok penggiat dan pencinta warisan budaya yang fokus terhadap usaha preservasi cagar budaya.

METODE

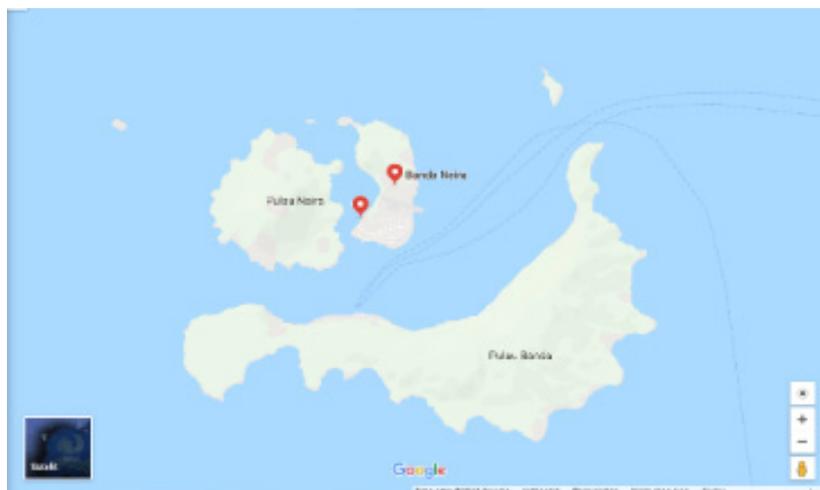
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan studi pustaka. Observasi berupa survei dan wawancara, dilakukan untuk mengumpulkan data lapangan, serta persepsi masyarakat ataupun pemangku kepentingan. Pertanyaan yang diutarakan seputar pemahaman para pemangku kepentingan mengenai nilai penting sebuah tinggalan kolonial di tengah kehidupan masyarakat Banda Neira dewasa ini, serta bagaimana pendapat dan harapan mereka mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tinggalan kolonial di Banda Neira di masa yang akan datang. Data yang dikumpulkan dalam observasi kemudian diolah dan dilengkapi

dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.

Lokus penelitian dalam artikel ini difokuskan di Pulau Neira, yaitu satu pulau dalam gugusan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah (gambar 1). Analisis yang digunakan untuk mengolah data menggunakan pendekatan kualitatif. Data disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Interpretasi data dari penulisan laporan ini menggunakan perspektif Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya dan beberapa literatur yang kerap digunakan dalam pembahasan mengenai konsep-konsep nilai penting. Penekanan dari artikel ini berfokus untuk menginventarisasi beragam tinggalan kolonial di Banda Neira dan pemanfaatannya apakah sudah berbasis nilai penting dan juga telah mengikuti kaidah-kaidah pelestarian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum lebih jauh membahas mengenai pengelolaan di Banda Neira, tentu harus dicermati terlebih dahulu mengenai alasan mendasar mengapa tinggalan periode kolonial yang ada di Banda Neira memiliki hubungan penting antara narasi masa lalu dengan masyarakat sekarang dalam memandang cagar budaya. Dalam hal ini perlu dilakukan pencocokan dengan memori kolektif atau memorikomunal masyarakat. Hubungan penting ini selalu dikaitkan dengan keadaan masyarakat



Gambar 1. Lokasi penelitian Banda Neira non skalatis.
(Sumber: Google Maps, 2018)

sekarang dalam melihat perlu tidaknya warisan budaya tersebut dilestarikan, manfaat apa yang dapat diperoleh dari bangunan kolonial tersebut. Perlu dicermati bersama apakah warisan budaya tersebut semata-mata untuk kemaslahatan orang banyak, atau mungkin juga apakah semua tinggalan tersebut berguna bagi pembentukan kesadaran kesejarahan mereka. Randall Mason (2008) dalam esainya menulis:

'Where do values come from?' has been a question of considerable debate. Should material culture recognized as heritage be said to have some intrinsic value (unchanging and universal), or should heritage value be seen as radically and essentially extrinsic and constructed out of the various social contexts of the object, building, or site? The answer seems to lie somewhere in between: value is form in the nexus between ideas and things.

Mason memaparkan dalam penjelasannya bahwa sering dipertanyakan mengapa diperlukan sebuah hubungan penting antara sejarah masa lalu dan pemahaman masyarakat sekarang. Mason menerangkan bahwa diperlukan sebuah koneksitas antara ide dengan suatu hal yang hendak dilekatkan pada cagar budaya yang selalu dianggap memiliki nilai-nilai yang tak berubah dan berlaku universal. Seharusnya budaya material itu dapat dikenali dengan menganggapnya sebagai suatu hal yang memiliki nilai hakiki yang tersimpan dan harus dikonstruksi dari bermacam konteks sosial yang tersedia di masa sekarang (Mason 2008, 100).

Seluruh tinggalan kolonial yang ada di Banda Neira merupakan budaya material yang memiliki konteks sejarah yang universal terkait adanya usaha bangsa asing untuk mencari rempah serta okupasi (pendudukan)

Kepulauan Banda dalam jangka waktu yang lama. Sejarahnya kemudian dikonstruksi, sehingga menjadikan Banda tersohor hingga seantero dunia dengan keberadaan buah pala. Masyarakat sekarang seyogianya menyadari kedekatan sejarah semacam itu sehingga memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tinggalan kolonial memiliki arti penting untuk pemahaman kesejarahan, ilmu pengetahuan terutama ilmu arkeologi, alasan edukasi dan kebudayaan. Tinggalan-tinggalan arkeologi di Banda Neira diuraikan sebagai berikut.

Rumah Budaya Banda

Museum yang bernama Rumah Budaya Banda ini berada di titik koordinat 04° 31' 32.8" LS dan 129 ° 53' 50.9" BT. Rumah Budaya Banda menyimpan koleksi barang-barang yang pernah digunakan selama pendudukan bangsa asing di Banda Neira (gambar 2). Koleksinya meliputi beberapa meriam kecil atau *lela*, timbangan pala, botol minuman, gentong air, mata uang, perabot rumah tangga, genta, beberapa foto dan lukisan, serta koleksi buku yang diperoleh dari instansi ataupun sumbangan dari kolektor. Observasi berkenaan dengan keterawatan yang terlihat di museum ini tampak cukup diperhatikan meskipun di beberapa bagian museum seperti pencahayaan dan kelembaban perlu dilakukan pembenahan. Beberapa koleksi buku yang terdapat di rak-rak dalam museum juga tampak lapuk dan sebagian besar telah dimakan rayap.



Gambar 2. Pintu masuk Museum Rumah Budaya Banda (kiri), beberapa koleksi di dalam museum (kanan).

(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

Infografis dan tulisan di setiap benda yang dipamerkan dalam museum ditulis dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris. Alur pengunjung hanya dari satu pintu masuk yang juga sebagai pintu ke luar. Tidak ada pembatasan jumlah pengunjung yang masuk dan ke luar museum. Hanya ada sebuah kotak donasi yang ditaruh bersama satu buah buku tamu di dekat pintu guna pendataan jumlah pengunjung harian.

Meriam VOC

Secara astronomis meriam ini berada pada titik kordinat $04^{\circ} 31' 32.9''$ LS dan $129^{\circ} 54' 51.7''$ BT. Dari keterangan narasumber, tidak diketahui sejak kapan dan kenapa meriam berada di lokasi tersebut. Informasi dari BPCB Ternate menyebutkan bahwa ada rencana untuk mengangkat meriam tersebut ke Benteng Nassau. Meriam diperkirakan berasal dari Benteng Nassau karena ukuran Meriam sama dengan ukuran penampang bidang *embrasure* atau tatakan meriam selain di *bastion* yang ada di Benteng Nassau. Benteng Nassau sendiri lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi meriam tersebut. Rencana langkah preservasi yang akan diambil ialah melakukan pengangkatan meriam dari tepi jalan dimana meriam ini berada saat ini (gambar 3). Hal ini bisa menjadi upaya awal untuk penyelamatan tinggalan arkeologis dari vandalisme ataupun tindak pencurian warisan budaya. Meriam tersebut sangat rentan dari penjarahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi ditambah



Gambar 3. Meriam VOC di Banda Neira.
(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

meriam yang rebah tersebut akan terpapar panas dan hujan langsung. Tingkat oksidasi tinggi menyebabkan korosif di penampang meriam, hal ini mengakibatkan kerusakan pada meriam tersebut.

Gereja Tua Neira

Informasi narasumber menyebutkan bahwa gereja ini didirikan pada tanggal 20 April 1873 dan diresmikan pada tanggal 23 Mei 1875 oleh dua orang misionaris asal Belanda yaitu Maurits Lantzius dan John Hoeke. Gereja ini dibangun di atas kuburan 30 orang prajurit Belanda yang gugur dalam perang penaklukan Banda. Terdapat 30 batu nisan lengkap dengan identitas para prajurit tersebut di lantai gereja. Hingga saat ini, bangunan tersebut masih digunakan sebagai rumah peribadatan umat Nasrani di Banda Neira (gambar 4).



Gambar 4. Gereja Tua Neira.
(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

Signifikansi ilmu pengetahuan yang dapat kita sadur dari tinggalan gereja tua ini ialah bahwa bangunan purbakala tersebut merupakan contoh bangunan klasik berlanggam kolonial dengan gaya pilar. Gaya pilar tersebut secara eksplisit adalah bahan kajian penting dalam pembahasan seni arsitektur dan gaya bangunan yang lazim digunakan di Eropa. Dari gereja ini kita dapat mengasumsikan dan menginterpretasikan mengenai evolusi gaya bangunan berpilar yang pernah ada di Indonesia.

Sociëteit Harmonie

Tinggalan berikutnya ialah bangunan yang dikenal dengan sebutan *Sociëteit Harmonie* terletak di sebelah Barat Kompleks Istana Mini, secara astronomis berada di titik koordinat $04^{\circ} 31' 44.3''$ LS dan $129^{\circ} 53' 59.2''$

BT. Bangunan *Sociëteit Harmonie* berdiri di atas lahan seluas 1480 m² dengan luas bangunan 540 m². *Sociëteit Harmonie* dalam Bahasa Belanda secara harfiah berarti “kerukunan masyarakat”, hal ini berkaitan dengan fungsi bangunan ini pada masa lalu yaitu sebagai tempat para pegawai sipil, militer, *perkeniers* atau para pengusaha dan pemilik pengasapan pala dan para bangsawan lainnya berkumpul dan berbincang-bincang atau bersosialisasi. Pada saat-saat tertentu, tempat ini dipakai untuk pertunjukan musik ataupun drama. Beberapa informasi menyebutkan bahwa bangunan ini dulunya adalah bangunan mewah berlantai marmer dengan lampu gantung yang indah dan merupakan salah satu gedung terbaik di Kota Neira. Saat ini, bangunan tersebut tampak terbungkalai, catnya sudah memudar dan mengelupas. Bagian langit-langit banyak yang telah rusak. Pemerintah daerah seyogianya mengusulkan untuk penambahan tenaga juru pelihara, sehingga banyak bangunan peninggalan kolonial yang ada di Banda Neira dapat terpantau dengan optimal. Tim Ahli Cagar Budaya Daerah (TACBD) Provinsi Maluku seharusnya memberi perhatian lebih pada bangunan *Sociëteit Harmonie* ini (gambar 5). Bangunan semacam ini memberikan signifikansi pengetahuan kepada kita bahwa, telah mengakar sebuah sistem sosial yang terbangun antar masyarakat Eropa yang tinggal di Banda Neira.



Gambar 5. Gedung Sociteit Harmonie (kiri), bagian teras depan yang tampak kurang terawat (kanan).
(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

Rumah Bergaya Indis

Bangunan berikutnya adalah sebuah rumah bergaya Indis yang terdapat di sebelah Barat Kompleks Istana Mini yang terletak pada kordinat 04° 31'44.2" LS dan 129° 54' 00.3" BT. Saat ini digunakan sebagai kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Banda (gambar 6). Bangunan ini memiliki ciri khas jendela ganda dengan tampilan lebar dengan daun pintu yang tinggi. Pada bagian lantai, menggunakan tegel merah berukuran 40x40 cm. Tegel atau ubin semacam ini umum dijumpai di setiap bangunan kolonial di daerah Banda. Langit-langit bangunan terbuat dari bahan kayu, kondisinya masih tampak asli dan terawat. Bagian dalam dari bangunan berisi beberapa perabotan kursi dan meja untuk melayani tamu. Penggunaan bangunan tua semacam ini, tentu akan membawa dampak yang menguntungkan



Gambar 6. Rumah bergaya Indis.
(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

bagi bangunan bergaya Indis ini. Melalui pandangan sekilas, orang awam sekalipun dapat membedakan berbagai ornamen dan hiasan yang ada di dalam rumah sungguh berbeda dengan ornamen dan gaya bangunan saat ini. Nuansa kolonial akan menyeruak sehingga memberikan suatu persepsi tersendiri bagi siapapun yang memasuki bangunan tersebut. Tentu juga bangunan pilar semacam ini akan memberikan signifikansi pengetahuan kepada kita berkaitan dengan evolusi bentuk bangunan yang disesuaikan dengan keadaan lokalitas daerah.

Patung Logam *Majesteit Willem III*

Patung *Majesteit Willem III* terdapat di sebelah Istana Mini, yaitu pada koordinat 04° 31' 43.6" LS dan 129° 54' 00.7" BT. Lokasinya masih berdekatan dengan Rumah bergaya Indis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Kecamatan Banda. Patung ini dibuat dari logam, dan diletakkan di pelataran atau luar ruangan tanpa atap pelindung, sehingga langsung terpapar sinar matahari dan hujan. Beberapa bagian patung ini, ditumbuhi beberapa *lichens* dan jamur yang dapat merusak bahan logam. Selain itu letak bangunan tempat lokasi patung ini berdekatan dengan pantai sehingga menyebabkan patung tersebut terpapar uap garam yang berasal dari laut. Dengan tingkat oksidasi yang tinggi tentunya mempercepat korosif pada patung berbahan logam tersebut (gambar 7).



Gambar 7. Patung *Majesteit Willem III*.
(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

Istana Mini dan Rumah *Deputy Governoor VOC*

Kompleks Istana Mini bersebelahan dengan bangunan rumah *Deputy Governoor VOC*. Secara astronomis, bangunan istana mini terletak pada titik koordinat 04° 31' 43.9" LS dan 129° 54' 01.8" BT, sedangkan Rumah *Deputy Governoor VOC* berada di titik koordinat 04° 31' 44.0" LS dan 129° 54' 03.3" BT. Bangunan kediaman *Deputy Governoor VOC* memiliki luas 575 m² yang dibangun di atas lahan seluas 1312 m² (gambar 8). Bangunan ini pernah



Gambar 8. Teras depan dari Istana Mini (atas),
teras depan Rumah *Deputy Governoor VOC* (bawah).
(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

dipugar pada tahun 2010 oleh Yayasan Tahija. Atap bangunan setelah dipugar menggunakan sirap dari Kalimantan. Sebelum dilakukan pemugaran atap berupa seng bergelombang. Berdasarkan data foto-foto lama, bahan atap mengalami beberapa kali perubahan. Pertama kali dibangun menggunakan genteng tetapi dengan alasan keamanan penghuninya akibat sering terjadi gempa vulkanik, maka atap diganti dengan rumbia. Pada akhir abad XIX atau awal abad XX bersamaan dengan masuknya seng gelombang di pasaran konstruksi Hindia Belanda, atap bangunan diganti dengan seng bergelombang.

Keadaan Istana Mini dan Rumah *Deputy Governoor VOC* yang bersebelahan tersebut tampak terawat. Sama persis dengan apa yang

didapati di Rumah Budaya Banda, di Istana Mini juga tidak dipungut biaya retribusi masuk, hanya terdapat satu kotak donasi dan buku tamu bagi orang datang berkunjung. Pencahayaan pada siang hari di dalam Istana Mini cenderung sedikit agak gelap di bagian tengah ruangnya untuk ukuran museum, namun kelembabannya sangat baik mengingat langit-langit yang tinggi di dalam ruangan.

Struktur Gapura di sebelah bekas Gereja Katolik

Terdapat struktur gapura di sebelah bekas bangunan Gereja Katolik tidak jauh dari rumah *Deputy Governoor* VOC. Secara astronomis struktur gapura berada pada titik koordinat 04° 31' 43.5" LS dan 129° 54' 05.4" BT. Gapura tersebut persis di sebelah rumah penduduk yang juga berhadapan dengan SMP PGRI Banda (gambar 9). Terdapat juga tegel merah yang biasa ditemui di bangunan kolonial berukuran 40x40 cm, beberapa bagian tegel ini berada di pekarangan depan rumah penduduk. Diduga tegel tersebut diambil dari suatu tempat dari salah satu bangunan kolonial di Pulau Neira untuk dijadikan semacam hiasan teras depan menuju pintu masuk rumah penduduk. Tindakan penjarahan seperti itu tentu saja dapat merusak informasi dari kepingan utuh sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu di Banda Neira.



Gambar 9. Bekas struktur gapura (kiri), tegel merah yang berada di pekarangan rumah penduduk (kanan).
(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

Rumah Pengasingan Hatta

Rumah pengasingan Hatta berada di samping Lembaga Pemasyarakatan Banda dan terletak pada koordinat 04° 31' 38.3" LS dan 129° 53' 59.3" BT. Bangunan rumah tempat pengasingan ini banyak menyimpan koleksi Bung Hatta selama masa pengasingannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Ruangan tersebut dipenuhi dengan foto repro yang dimiliki oleh keluarga Des Alwi. Pada tahun 2016 menurut juru pelihara situs, rumah pengasingan ini pernah mengalami pencurian barang koleksi. Saat ini, kondisi rumah tampak terawat dan koleksi disusun rapi dengan beberapa informasi yang ditulis secara singkat. Bagian-bagian rumah ini dibagi menjadi beberapa ruangan, terdiri dari ruang tidur, ruang tamu, ruang belajar di teras belakang, dan bagian belakang rumah berupa kamar mandi dan dapur terletak terpisah dari ruangan utama (gambar 10).



Gambar 10. Rumah Pengasingan Moh. Hatta.
(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

Rumah Pengasingan Tjipto Mangunkusumo

Rumah pengasingan Tjipto Mangunkusumo terletak pada koordinat 04° 31' 43.3" LS dan 129° 54' 10.3" BT, lokasinya berada persis di depan SMP Negeri 1 Banda. Keadaan rumah pengasingan tersebut tampak cukup terawat meskipun masih dapat dilihat beberapa elemen bangunan yang telah mengalami pelapukan. Beberapa bagian pilar juga tampak telah mengelupas dan keropos. Rumah pengasingan ini dulu dihuni oleh Tjipto Mangunkusumo beserta keluarga selama

pengasingannya di Banda Neira dari tahun 1928 hingga 1940. Dari papan informasi disebutkan bahwa rumah pengasingan Tjipto tersebut dikelola oleh Yayasan Warisan dan Budaya Banda Neira.



Gambar 11. Rumah pengasingan Tjipto Mangunkusumo
(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

Parigi Rante

Monumen Parigi Rante terletak pada koordinat $04^{\circ} 31' 41.8''$ LS dan $129^{\circ} 53' 55.7''$ BT. Lokasi monumen Parigi Rante berada persis di depan Penginapan Cilubintang Banda (gambar 12). Berdasarkan informasi prasasti yang ada, monumen tersebut didirikan dan diresmikan tahun 2002 atas nama Presiden RI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS dan Pejabat Gubernur Maluku S.H Sarundajang. Monumen itu didirikan sebagai tugu atau tempat peringatan dimana di lokasi tersebut dipercaya pernah terjadi pembantaian massal rakyat Banda semasa pemerintahan Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Coen. Hukuman mati kepada lebih dari 6000 jiwa rakyat Banda tersebut terjadi pada tanggal 8 bulan Mei tahun 1621 waktu pagi hari berdasarkan data dokumen-dokumen



Gambar 12. Monumen Parigi Rante.
(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

VOC. Dokumen itu disusun dan ditranslasikan oleh Des Alwi sebagai Ketua Yayasan Banda Neira bersama Dr. Hamadi Husein. Disebutkan juga dalam dokumen tersebut banyak rakyat Banda yang diasingkan ke Jawa, lebih 1700 jiwa rakyat Banda melarikan diri ke Banda Eli, Banda Elat, Kepulauan Kei, Pulau Seram dan tempat lainnya.

Benteng Nassau

Benteng Nassau terletak pada koordinat $04^{\circ} 31' 40.2''$ LS dan $129^{\circ} 53' 49.5''$ BT. Saat ini BPCB Ternate sedang melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Benteng Nassau ini. Dari catatan sejarah seperti yang disebutkan bahwa Benteng Nassau dibangun pada tahun 1609 sebagai benteng pengontrol perdagangan buah pala di Kepulauan Banda (gambar 13) (Hanna 1991, 27). Benteng ini berukuran besar dan berfungsi sebagai pertahanan dari resistensi rakyat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala VOC. Selain sebagai benteng pertahanan, Benteng Nassau juga berfungsi sebagai kantor administrasi Belanda di Pulau Banda.



Gambar 13. Pintu gerbang sebelah Barat Benteng Nassau.

(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

Benteng Belgica

Keletakan Benteng Belgica berada pada titik koordinat $04^{\circ} 31' 35.1''$ LS dan $129^{\circ} 53' 55.3''$ BT. Benteng ini didirikan untuk mengatasi kekeliruan dan kekurangan dari pembangunan Benteng Nassau sebelumnya, yang notabene berlokasi di bibir pantai yang mudah diserang melalui bukit yang lebih tinggi dibelakangnya. Rakyat Banda Neira yang terusir oleh Belanda

dan mengungsi ke pulau lain di sekitar Pulau Neira, sering melakukan serangan gerilya dan menembaki Benteng Nassau dengan panah api dari atas bukit tersebut. Untuk menghentikan perlawanan penduduk Neira pada tahun 1611 Gubernur Jenderal Pieter Both menggagas pembangunan sebuah benteng pertahanan kecil di atas bukit itu dengan ketinggian 30 mdpl dan diberi nama Belgica (gambar 14).

Kesejarahannya terkait dengan benteng ini dimulai pada Maret 1667, Adrian de Leeuw, seorang arsitek Belanda membuat rancangan benteng baru dan mengembangkan sebuah benteng berjenis *redout*. Benteng ini dibangun dengan struktur pentagon, memiliki lima buah menara pada bagian dalam. Benteng ini juga mempunyai lima bastion di sisi luarnya. Pembangunan benteng ini berlangsung dari tahun 1672 hingga tahun 1673 tanpa mengalami kendala yang berarti. Benteng Belgica dapat



Gambar 14. Benteng Belgica.

(Sumber: Dokumentasi Balar Maluku, 2018)

menampung 400 tentara yang dilengkapi dengan berbagai persenjataan termasuk meriam. Pada Tahun 1795 benteng ini dipugar oleh Francois van Boeckholz, satu tahun kemudian benteng ini berhasil diserang dan direbut oleh Inggris yang kemudian menguasai Banda hingga awal abad ke 19 (Hanna 1991, 28). Sekilas benteng ini tampak sangat terawat, meskipun di beberapa sudut ruangan benteng terdapat beberapa vandalisme berupa coretan yang sudah ditutupi dengan cat warna putih. Menurut juru pelihara benteng, setelah dipugar tahun 1991 benteng kerap dikunjungi oleh wisatawan asing dan wisatawan lokal. Terdapat juga beberapa meriam di luar Benteng Belgica.

Menurut pihak BPCB Ternate, akan dilakukan pengangkatan beberapa meriam yang ada di bagian luar benteng, dan rencananya akan ditempatkan di beberapa *embrasure* dan bastion Belgica sebagai usaha penyelamatannya.

Aspek Nilai Penting dan Evaluasi Pengelolaan *Heritage* di Banda Neira

Hal yang akan didiskusikan berikut ini berkenaan dengan bagaimana tinggalan kolonial yang masih bertahan di tengah masyarakat Banda Neira harus tetap lestari. Tinggalan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan keadaan Banda hingga hari ini. Tanggung jawab yang besar generasi saat ini adalah berusaha menyediakan kecukupan informasi dan narasi sejarah Banda Neira bagi generasi yang akan datang.

Penjelasan semua lokasi yang telah di survei, memperlihatkan beragam aspek penting yang ada di berbagai tinggalan kolonial di Banda Neira. Perlunya mempertegas nilai intrinsik untuk memberikan gambaran bagaimana budaya material yang masih ada dan terpelihara tersebut bisa tersambung dengan masyarakat sekarang. Konsep dan gagasan mengenai nilai penting dijabarkan oleh Smith, yang argumennya bersandar pada bagaimana menerjemahkan warisan budaya dan memperluas pengertian nilai pentingnya. Sebuah warisan budaya akan dianggap penting oleh masyarakat jika memberikan kemaslahatan (Smith 2006, 13).

Lebih lanjut lagi, Smith menjabarkan konsep nilai penting merupakan sebuah wacana yang berawal dari penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan bertalian dengan suatu konsep yang kuat, di dalamnya terdapat konstruksi gagasan dan kategorisasi yang diproduksi, direproduksi dan ditransformasikan ke dalam realitas sosial. Dianggap sebagai cara pandang yang kerap digunakan oleh berbagai disiplin ilmu serta merupakan sebuah representasi pengetahuan (Foucault 1991; Hajer 1996; Fairclough 2001; dalam Smith 2006, 14).

Berdasarkan pemikiran yang mengikuti prinsip Foucault di atas, Smith merasa perlunya pengetahuan memadai terlebih dahulu sebelum mengkonstruksi pemahaman yang akan disodorkan menjadi nilai penting bagi sebuah warisan budaya. Cara pandang tersebut harus jugadapatbertransformasiuntukmenjadibahasa yang akan meyakinkan publik. Nilai penting yang disuguhkan dalam bahasa tersebut adalah satu-satunya kekuatan yang akan memberikan pemaknaan terhadap warisan budaya tersebut menjadi penting. Dengan kata lain, dengan bahasa yang tepat, maka pemaknaan nilai penting tersebut menjadi kuat. Narasi yang kuat tersebut pada gilirannya akan meyakinkan banyak pihak mengenai pentingnya suatu warisan budaya untuk dilestarikan. Banyak pihak seperti Pemda, elit daerah (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), pemangku kepentingan lainnya, serta bagi pihak manapun yang menaruh perhatian terhadap upaya pelestarian warisan budaya, akan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya pemahaman konservasi dan preservasi.

Setelah adanya wacana tentang nilai penting tinggalan kolonial di Banda Neira yang hendak diberikan kepada masyarakat, hal yang tidak kalah penting adalah penerima informasi tersebut yaitu masyarakat dan pemangku kepentingan. Mereka memiliki pengetahuan dan persepsi sendiri-sendiri tentang tinggalan kolonial yang ada di Banda Neira. Seperti yang pernah digambarkan Maslow (1970) mengenai motivasi dalam diri manusia yang secara instingtif kemudian akan mengaktualisasikan persepsinya mengenai segala sesuatu. Jika diterjemahkan ke dalam bentuk pelestarian warisan budaya, maka masyarakat dan pemangku kepentingan di Banda Neira juga tentu memiliki motivasi dan hasrat untuk melestarikan warisan budaya seperti yang telah dijelaskan di atas (Maslow 1970, 22).

Dengan kata lain masyarakat Banda memiliki pengetahuan, hasrat dan motivasi serta aktualisasi diri sendiri dalam memandang warisan budaya di Banda Neira. Pemahaman

semacam ini perlu dikembangkan di tengah masyarakat agar memantik rasa sadar demi usaha pelestarian tinggalan arkeologis yang banyak bersisian dengan aktivitas masyarakat saat ini. Tentu ini bisa membentuk nilai dan kebanggaan bangsa melalui kesejarahan. Mengingat tinggalan arkeologis di negara berkembang seperti Indonesia menurut Ramelan (2012), selalu dapat dikemas untuk dua tujuan yakni mempertahankan bentuk kekekunoan tinggalan fisiknya serta memperluas pemaknaan nilai penting tinggalan tersebut (Ramelan 2012, 186). Pentingnya dilakukan konservasi terhadap cagar budaya adalah untuk melindungi segala aspek yang terkandung di dalamnya, baik fisik maupun pemaknaan (*meaning*). Seperti yang ditulis oleh Ross (1996):

“there are perhaps three reasons why we wish to conserve the best of our buildings: the arcahaeological, the artistic and the social. The archaeological motive is the instinct to preserve something of historic interest. At its crudes, it is simply a desire to preserve the past a curiosity”

Penjelasan yang disampaikan Ross tersebut memuat pemahaman bahwa, motif arkeologis merupakan sebuah hasrat untuk melindungi semua aspek yang terkandung dalam suatu cagar budaya, dalam hal ini seluruh tinggalan kolonial yang ada di Banda Neira. Aspek sosial, estetis artistik, dan ilmu pengetahuan terkhusus mengenai sejarah dan kepurbakalaan, semuanya dianggap penting, perlu digali dan dilindungi keseluruhannya. Hal tersebut dianggap sebagai bahan paling elementer demi usaha memelihara narasi masa lalu dan bukti fisiknya (Ross 1996, 1).

Hal lainnya yang cukup menonjol dan sering dipakai untuk beberapa aspek pengembangan cagar budaya, tentu memerlukan banyak pertimbangan. Salah

satunya yang dikemukakan oleh (Ardika 2012, 24) dimana orientasi pembangunan di Indonesia seharusnya menggunakan kebudayaan sebagai cara pandang atau wawasan untuk mengawasi berbagai permasalahan pembangunan dewasa ini. Permasalahan belakangan ini adalah permasalahan yang muncul di hampir semua aspek kehidupan baik, ideologi, politik, maupun sosial budaya. Akar permasalahannya adalah terabaikannya nilai leluhur, moral, etika kehidupan berbangsa sebagai landasan maupun tujuan dari pembangunan. Seharusnya di semua aspek kehidupan maupun di semua sektor pembangunan menggunakan kebudayaan, khususnya bentuk tak ragawi (moral dan etika) kebudayaan sebagai titik tolak awal perumusan perencanaan maupun elemen rumusan tujuan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan berwawasan budaya (Ardika 2012, 25). Sementara itu menurut (Bond & Worthing, 2016) ada semacam pengayaan pemahaman dimana aspek-aspek masa lalu kebudayaan ataupun warisan budaya dijadikan komoditas untuk masa sekarang. Kebanyakan orang berusaha melarikan diri dari keseharian hidup dan tekanan modernitas dengan mencari obsesi baru berkenaan dengan masa lalu. Kemudian hal ini berhubungan dengan *heritage industry* dan pariwisata. Banyak orang mencari pelarian dengan mendatangi tempat-tempat yang menyediakan narasi masa lalu, mendatangi situs dan lokasi cagar budaya ataupun kompleks tinggalan arkeologis. Akibat dampak negatif kepenatan hidup, orang mencari cara alternatif dan kemudian mendorong mereka untuk mencari waktu senggang agar bisa bepergian mendatangi tempat-tempat yang dimaksud di atas (Bond & Worthing 2016, 51).

Contoh dua kasus di atas merupakan sebuah kenyataan yang sungguh terjadi dewasa ini. Dimana di satu sisi kebudayaan dijadikan sebuah falsafah dan pandangan hidup, di sisi lain kebudayaan dan berbagai aspeknya dijadikan komoditas pariwisata yang sudah menjadi industri yang menguntungkan. Hal

ini yang kemudian menjadi pilihan yang akan ditempuh, mana yang paling menonjol untuk diakomodir dan diterapkan. Dengan kata lain, harus bisa diterima sebuah keadaan dimana di satu sisi diharapkan pembangunan berwawasan budaya, dan di saat bersamaan ada sebuah kenyataan pariwisata mampu berkontribusi meningkatkan pembangunan. Untuk alasan di atas tentu saja Pemerintah Daerah di Banda Neira dan Pemerintah Provinsi Maluku secara khusus harus dapat memberikan keseimbangan antara usaha kesadaran sejarah dengan jalan melestarikan tinggalan kolonial sembari memberikan sebuah komoditas pariwisata, agar pelancong ke Banda Neira bisa mengucurkan pendapatan asli daerah.

Pemanfaatan Tinggalan Kolonial di Pulau Neira

Hal berikut kemudian, bahwasanya pemanfaatan tinggalan arkeologi dalam wujud penggunaan tinggalan kolonial sebagai salah satu usaha pelestarian yang cukup relevan bisa diterapkan meskipun hal tersebut cukup beresiko terhadap otentisitas tinggalan dan ketahanan warisan budaya itu sendiri. Kondisi ini dapat dilihat di lokasi penelitian yakni, pada rumah bergaya Indis di dekat kompleks Istana Mini yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Banda sebagai kantor. Tentu saja itu terkait kontestasi penggunaan cagar budaya, dimana Pemerintah Banda Neira sebagai regulator yang berwenang. Pemerintah dalam hal ini memiliki hak penuh untuk mengelola setiap warisan budaya yang ada di wilayah administratifnya. Berkaitan dengan hal tersebut (Ashworth, 1997) mencoba memberikan gambaran mengenai aktivitas penggunaan warisan budaya yang meliputi:

‘‘Pertama, warisan digunakan sebagai sumber budaya, yang memiliki nilai dan membentuk dasar untuk menjadi koleksi yang dapat dipamerkan, dimana museum memiliki peran pusat secara

institusi; kedua, warisan digunakan sebagai sumber politik untuk membuat atau mendukung negara dalam beberapa skala yuridiksi spasial dan legitimasi pemerintah beserta ideologinya. Ketiga, warisan juga digunakan sebagai sumber ekonomi dalam mendukung aktivitas ekonomi secara langsung seperti menjadi industri sendiri atau secara tidak langsung sebagai penyumbang terhadap preferensi pemilihan lokasi dari aktivitas ekonomi lainnya.”

Bangunan seperti Rumah Budaya Banda, Istana Mini, dan Benteng Belgica tidak ada retribusi tiket masuk sehingga jelas tidak ada perilaku sumber daya ekonomi di dalamnya. Lain halnya dengan rumah bergaya Indis yang menjadi kantor Dikbud UPT Banda, bangunan tersebut menjadi legitimasi pemerintah dalam melestarikan warisan budaya. Peran institusi Dikbud UPT Banda yang menggunakan bangunan kolonial tersebut menjadi fungsi perkantoran, dapat diartikan sebagai usaha pemberian pemaknaan kembali tinggalan masa lalu oleh generasi sekarang. Seperti layaknya pajangan koleksi museum, namun pengunjung bisa juga mendapati aktivitas modern yaitu kantor pemerintah di dalamnya di saat bersamaan. Dengan kata lain bahwa bangunan bergaya Indis tersebut secara tidak langsung menjadi sumber daya budaya dan sumber daya politis sekaligus (Ashworth 1997, 34).

Hasil yang diperoleh di lapangan dari penelitian ini adalah bahwa banyak tinggalan arkeologis dari periodisasi kolonial (seperti meriam, gereja, benteng, struktur dinding benteng, rumah tinggal, rumah pengasingan, dan lain-lain) kini bersinggungan dengan aktivitas modern masyarakat Banda Neira. Peran juru pelihara sangat vital untuk memonitor semua tinggalan tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap upaya-upaya pelestarian warisan budaya yang sudah dilakukan. Pemahaman

masyarakat Banda Neira juga cukup baik mengenai kesejarahan Banda yang dianggap seperti “Eropa kecil”, meskipun tak bisa ditampik untuk tetap menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya demi kesadaran menjaga warisan budaya itu sendiri.

Peran pemerintah daerah juga cukup konsisten dalam menjalankan pengelolaan kolaboratif di Neira, dimana melibatkan masyarakat secara partisipatoris, sebagai contoh pengadaan tenaga juru pelihara di rumah pengasingan Hatta, meskipun di beberapa titik lokasi situs perlu ditingkatkan dengan menambah tenaga juru pelihara. Pada sisi lainnya, peran pemerintah pusat berusaha berkomunikasi dengan publik melalui produk hukum Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Hal yang mendasar yang bisa kita lihat ialah setiap cagar budaya yang ada di Neira menjadi aset kultural yang sangat dijaga keasriannya. Pemerintah, masyarakat dan komunitas perlu untuk saling bersinergi dan terintegrasi satu sama lain agar dapat menjaga warisan budaya sebagai aset kultural yang harus lestari.

Esensi dari komunikasi seperti ini akan sangat memberikan pengaruh, dampak dan implikasi pada keseluruhan kehidupan manusia yang memiliki kemampuan untuk memaknai kembali arti penting tinggalan masa lalu sebagai sebuah khasanah kebudayaan yang bisa dibanggakan pada masa sekarang terlebih untuk generasi mendatang. Proses komunikasi seperti ini diperlukan untuk memperkuat peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk menautkan pemahaman bahwa tinggalan budaya selalu bisa diartikan bernilai penting dan bisa dikelola secara berkelanjutan. Kesadaran oleh masyarakat berkenaan dengan bagaimana mereka memandang warisan budayanya harus terlebih dahulu dibangun dari pikiran mereka.

Seperti yang juga pernah dikemukakan oleh Rodney Harrison (2013), menyatakan bahwa seseorang akan cenderung menjadi peduli dengan cagar budaya jika mereka

mengalami keterikatan secara historis di dalamnya. Tahapan yang diutarakan meliputi: (1) masyarakat secara metafora merasa mereka tidak kehilangan jejak atau runtuh memori kolektif akan kesejarahan mereka sendiri, (2) setelah mereka sadar mendapati diri mereka memiliki memori kolektif, tentu mereka akan terhindar dari pengabaian akan tinggalan budaya. Mereka akan cenderung lebih peduli terhadap tinggalan arkeologis yang sarat dengan muatan narasi kesejarahan mereka sendiri (3) tahap terakhir ialah masyarakat tidak akan melakukan *predatory heritage* ataupun pengrusakan akan nilai kesejarahan itu sendiri.

Bahkan di artikel yang lain Harisson pernah mempertajam semua tahapan tersebut sebagai sebuah keniscayaan dalam usaha preservasi warisan budaya (*heritage*) yang harus menjadi perhatian. Tahapan di atas merupakan sebuah gambaran mengenai manusia secara individu dan secara kelompok dalam masyarakat akan berperilaku terhadap cagar budaya yang ada di sekitarnya. Ketika mereka tidak menjadi predator untuk *heritage* mereka sendiri baik dengan cara perampasan, pencurian, penggelapan, tidak melaporkan kepemilikan dan bahkan pengrusakan, maka itu dianggap suatu hal yang efektif demi kelangsungan kelestarian tinggalan cagar budaya (Harisson 2013, 178).

KESIMPULAN

Berkaca dari pemanfaatan beragam tinggalan kolonial di daerah ini menunjukkan adanya upaya pelestarian tinggalan arkeologis dalam bentuk pemfungsian bangunan kuno. Pemfungsian disini juga berarti adanya perubahan dari sisi penggunaan kembali tinggalan arkeologi yang bersifat adaptif (hal ini juga dikenal dalam kalangan arsitek pelestari ialah sebagai perlakuan *adaptive-reuse* pada bangunan kuno). Biasanya juga hal tersebut selain menjaga nilai otentik bentuk fisiknya juga sekaligus merawat narasi historis yang melekat, bahwasanya

Banda Neira merupakan wilayah yang sarat informasi sejarah dan kepurbakalaan. Terlebih juga dengan memberdayakan masyarakat, agar dapat untuk turut serta berpartisipasi menjaga kelestarian bangunan kolonial di Banda Neira (dalam bentuk pengadaan juru pelihara). Model pengelolaan seperti ini sungguh baik mengingat gagasan dan pokok pikiran yang diusung oleh UU CB Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ialah bahwa pemerintah bukan lagi menjadi operator tunggal dalam pengelolaan dan pemanfaatan warisan budaya di Indonesia. Masyarakat Neira dapat berperan dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* lainnya yang tersedia di sana, demi kelangsungan kelestarian warisan budaya. Tentu saja masyarakat Neira diberikan keleluasaan dalam menginterpretasikan ulang warisan budaya yang mereka miliki. Hal yang perlu ditingkatkan dan dibenahi ke depan ialah sinergitas antar *stakeholder* (pemangku kepentingan) agar komunikasi yang fokus dapat terwujud untuk usaha pelestarian yang akan diskemakan terhadap beragam tinggalan *heritage* di sana. Secara gamblang juga dapat dikatakan, perlu upaya yang serius agar *cultural value* tinggalan budaya di daerah ini dapat digubah menjadi *economic value* yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat di sana. Dengan begitu usaha preservasi warisan budaya akan dapat mudah teraplikasikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Cheviano Eduardo Alputilla dari BPCB Ternate yang telah membantu menyediakan bahan awal penulisan artikel ini dalam bentuk pemetaan potensi arkeologis di Banda Neira. Sekaligus juga terlibat diskusi berkenaan dengan pemanfaatan dan pengelolaan tinggalan arkeologis di wilayah Maluku ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ardika, I. G. (2012). Pariwisata Minat Khusus Berbasis Arkeologi. In *Arkeologi Untuk Publik*. IAAI.

- Ashworth, G. J. (1997). Elements of Planning and Managing Heritage Sites. In *Tourism and Heritage Management*. Gadjah Mada University Press. Bond, S., & Worthing, D. (2016). *Managing Built Heritage The Role of Cultural Values and Significance*. John Wiley & Sons.
- Fairclough, N. (2001). The Dialectics of Discourse. *Textus*, 14(2), 231–242.
- Foucault. (1991). *The Foucault Effect: Studies in governmentality*. University of Chicago Press.
- Hajer, M. A. (1996). Ecological Modernisation as Cultural Politics. In & B. W. S. Lash, B. Szerszynski (Ed.), *Risk, Environment and Modernity: Towards a New Ecology* (pp. 246–253). Sage Publications, Ltd.
- Hanna, W. (1991). *Indonesia Banda: Colonialism and its Aftermath in the Nutmeg Islands*. Yayasan Warisan dan Budaya Banda.
- Harisson. (2013). *Heritage Critical Approaches*. Routledge.
- Harrison. (2008). The Politics of the Past: Conflict in the use of Heritage in The Modern World. In J. Graham, F. Jameson, J. & Scofield (Ed.), *The Heritage Reader*. Routledge.
- Howard, P. (2003). *Heritage Management, Interpretation, Identity*. Continuum.
- Mansyur, S. (2009). Kajian Awal Karakteristik Museum Situs Banda Neira. *Kapata Arkeologi*, 5(8), 78–94.
- Maslow, A. (1970). *Motivation and Personality*. Harper&Row Publisher.
- Mason, R. (2008). Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and choices. In J. & S. J. Graham, F. Jameson (Ed.), *The Heritage Reader* (pp. 99–124). Routledge, Taylor and Francis Group.
- Ramelan, W. . (2012). Permasalahan Pengelolaan Cagar Budaya dan Kajian Sumberdaya Arkeologi. In *Arkeologi Untuk Publik*. IAAI.
- Ross, M. (1996). *Planning and the Heritage Policy and Procedures*. E& FN Spon.
- Sarjiyanto. (2009). *Kota Kuna Banda Neira, Maluku*.
- Smith, L. (2006). *Uses of Heritage*. Routledge.
- Throsby, D. (2002). Cultural Capital and Sustainability Concepts in the Economics of Cultural Heritage. In *Assessing the Values of Cultural Heritage*. The Getty Conservation Institute.